

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Dunia internasional kini tidak hanya didominasi oleh isu politik semata melainkan juga ekonomi, khususnya perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan untuk membangun sebuah negara yang kuat, dibutuhkan aktifitas ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan rakyatnya. Menurut Hamilton, perdagangan internasional akan membawa keuntungan bagi suatu negara, yang nantinya keuntungan tersebut akan bermuara pada kekuatan nasional negara.<sup>1</sup> Dengan perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka sendiri.

Banyak hal yang memengaruhi hasil produksi negara di antaranya iklim, kondisi geografis, penguasaan teknologi, sumber daya, dan lain sebagainya sehingga perdagangan internasional akan membuat negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Selain itu, perdagangan internasional dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan, yang mana hal ini dapat memacu spesialisasi produk dalam negeri serta memaksimalkan manfaat teknologi modern agar produk dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional.

---

<sup>1</sup> Jimmy Hasoloan, "Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian", diakses dari : <https://media.neliti.com/media/publications/271659-peranan-perdagangan-internasional-dalam-71f683a0.pdf>, pada : 10 November 2021 pukul 07.18 WIB.

Pergeseran zaman menampilkan peran aktor non negara yang tak kalah penting dan masing-masing dari mereka memiliki pengaruhnya tersendiri dalam perdagangan internasional. Salah satu aktor non negara yang fenomenal adalah perusahaan multinasional (MNC), aktor ini mengalami peningkatan rekognisi yang pada awalnya hanya dianggap sebagai entitas bisnis internasional menjadi aktor hubungan internasional yang sebenarnya. Hal ini disebabkan dinamisnya perkembangan hubungan internasional memperluas peran MNC yang sebelumnya hanya melakukan ekspansi internasional melalui *direct investment* sebagai aktor bisnis internasional, seiring dengan meningkatnya isu ekonomi internasional, MNC banyak berhubungan dengan pemerintah negara dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas perdagangan internasional.

Tiongkok sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang berkembang pesat menjadi negara yang menerima banyak MNC untuk berbisnis di sana. Hal ini dibuktikan dengan prestasi Tiongkok sebagai negara tujuan utama investasi asing langsung baru terfavorit di dunia. Investasi langsung Tiongkok pada tahun 2021 naik sebesar 4% mengalahkan Amerika Serikat yang justru turun hampir 50%. Bahkan secara global investasi asing turun drastis sebanyak 42%, namun Tiongkok justru mengalami peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan besarnya minat dan kepercayaan perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi di Tiongkok. Kepercayaan para investor berhubungan dengan keberhasilan Tiongkok untuk bangkit dari resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tiongkok merupakan negara pertama yang pulih ekonominya ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Diukur dari

PDB Tiongkok yang tumbuh 2,3% pada tahun 2020, membuat Tiongkok terhindar dari kontraksi ekonomi tahun lalu.<sup>2</sup>

Namun pada tahun 2020, pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan tegas terhadap perusahaan asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut. Otoritas negara Tiongkok telah melarang perusahaan asing mengambil sektor industri sensitif atau melakukan pemaksaan usaha patungan bersama perusahaan atau pengusaha lokal.<sup>3</sup> Walau dalam beberapa sektor seperti otomotif dan keuangan kebijakan ini telah dihapuskan, namun kebijakan ini belum dicabut untuk sektor teknologi yang juga merupakan industri sensitif di Tiongkok.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan Tiongkok juga merilis daftar perusahaan asing yang membahayakan kedaulatan dan keamanan di Tiongkok. Pasca pemerintahan Amerika Serikat di masa Donald Trump memberlakukan penambahan tarif atas barang-barang Tiongkok dan pembatasan operasi industri teknologi Tiongkok yakni Huawei Tech, Tiongkok akhirnya membuat daftar perusahaan asing yang dianggap berbahaya bagi kepentingan nasional negaranya. Daftar ini menargetkan perusahaan asing atau pengusaha yang mengganggu kesepakatan dengan perusahaan Tiongkok, melakukan tindakan diskriminatif ke perusahaan Tiongkok, serta melanggar transaksi pasar normal di Tiongkok. khususnya

---

<sup>2</sup> Idealisa Masyrafina, "China Geser AS Jadi Nomor Satu Tujuan Investasi Asing", diakses dari : <https://www.republika.co.id/berita/qnhzti368/china-geser-as-jadi-nomor-satu-tujuan-investasi-asing>, pada : 10 November 2021 pukul 15.34 WIB.

<sup>3</sup> CNBC Indonesia, "Xi Jinping Makin 'Garang', Investor Asing di China Mau Kabur?", diakses dari : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210928164157-17-279864/xi-jinping-makin-garang-investor-asing-di-china-mau-kabur>, pada : 10 Oktober 2021 pukul 21.31 WIB.

perusahaan yang bergerak di sektor teknologi.<sup>4</sup> Hal ini merupakan salah satu imbas dari perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat di sektor investasi asing.

Di saat yang bersamaan, Tiongkok memberlakukan suatu sistem skoring bernama sistem kredit sosial perusahaan atau *company's social credit system* yang merupakan turunan dari sistem kredit sosial Tiongkok yang sudah diuji cobakan sejak tahun 2014. Pada tahun 2020 pemerintah Tiongkok secara formal mulai menjalankan sistem kredit sosial perusahaan untuk mengontrol perilaku masyarakatnya sebagai pekerja di perusahaan, serta perilaku perusahaan-perusahaan yang berada di Tiongkok. Sistem ini merupakan sistem skoring perilaku perusahaan di Tiongkok dengan memberi penghargaan bagi perusahaan ber kredit sosial tinggi dan hukuman bagi perusahaan ber kredit sosial rendah.

Pada akhirnya sejak 2020, standar Tiongkok untuk menerima perusahaan asing menjadi lebih rigid dan ketat. Perusahaan yang berniat melakukan investasi dan berbisnis di Tiongkok harus memiliki kesesuaian kebutuhan dan kepentingan dengan Tiongkok. Walau ekonomi Tiongkok sendiri sebenarnya juga bergantung kepada investasi asing di negerinya, namun Tiongkok memutuskan membuat kebijakan ini untuk membatasi investasi asing yang tidak diperlukan demi menjaga kekondusifan iklim perdagangan lokal.

Dasar dari sistem ini adalah cetak biru sistem kredit sosial yang dibuat pada tahun 2014 berisi panduan kebijakan sistem kredit sosial. Tujuan umum dari sistem

---

<sup>4</sup> Reuters, "China Rilis daftar Perusahaan asing yang bahayakan keamanan negara, balas AS?", diakses dari : <https://internasional.kontan.co.id/news/china-rilis-daftar-perusahaan-asing-yang-bahayakan-keamanan-negara-balas-as>, pada : 10 November 2021 pukul 21.32 WIB.

kredit sosial adalah meningkatkan ekonomi positif yang selaras dengan nilai-nilai perilaku moral sosial yang dianggap baik di Tiongkok. Beberapa faktor seperti kondisi finansial, catatan kriminal, perilaku di sosial media akan menentukan tingkat sosial masyarakat.

Bagi masyarakat yang memiliki kredit sosial yang terlalu rendah maka sanksi akan diberlakukan seperti sanksi finansial tidak bisa membeli rumah, tidak bisa melakukan kredit barang, dan sanksi finansial lainnya. Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan dengan status yang tinggi dan berpengaruh tiap masyarakat harus mencapai standar kredit sosial tertentu.

Tahun 2018, 30 kota di Tiongkok telah mengimplementasi sistem kredit sosial ini dan meningkat 43 menjadi kota di tahun 2019. Sistem kredit sosial Tiongkok memadukan berbagai sistem dan menggunakan mekanisme *rewards and punishment* untuk meningkatkan pemerintahan serta membangun keharmonisan masyarakat Tiongkok yang cenderung sosialis.

Implementasi sistem kredit sosial baik untuk masyarakat di Tiongkok secara nasional belum terimplementasikan dengan standar nilai yang merata, atau setidaknya pemerintah Tiongkok sampai tahun 2022 belum membuka secara terang-terangan kriteria serta *database* nasional yang mencantumkan SCS dalam skala nasional. Sejak 2014-2020, implementasi SCS menggunakan *website* dan aplikasi yang beragam, masing-masing tergantung dengan platform yang dipakai daerah. Misalnya di daerah Suzhou, masyarakat melaporkan dan menginput skor mereka dalam aplikasi bernama

*Plum Blossom Social Credit*, sementara untuk di daerah Xiamen menggunakan aplikasi Bernama *Jasmine*.

Berbeda dengan SCS untuk masyarakat, SCS bagi perusahaan sudah memiliki standar atau panduan penilaian yang lebih jelas. Sebagian besar bisnis perusahaan dinilai berdasarkan peraturan standar dan kriteria kepatuhan yang secara hukum wajib dipenuhi seperti memiliki lisensi bisnis, membayar pajak tepat waktu, standar kualifikasi produk tercukupi, dan bisnis yang tidak menyalahi upaya perlindungan lingkungan. Selain itu terdapat persyaratan khusus untuk masing-masing sifat bisnis perusahaan dengan kualifikasi yang berbeda, tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut.<sup>5</sup>

Implementasi SCS perusahaan ini berkaitan dengan keputusan Tiongkok yang ingin menyesuaikan kriteria perusahaan asing yang berbisnis di Tiongkok dengan kepentingan ekonomi Tiongkok yaitu menciptakan bisnis yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tiongkok. Sistem kredit sosial perusahaan merupakan sistem yang memungkinkan individu menilai individu lain, perusahaan menilai perusahaan lain, maupun individu menilai perusahaan dan sebaliknya berdasarkan skor atau kredit sosial dengan melacak dan menilai tiap perilaku keseharian mereka di masyarakat menggunakan standar moral kebaikan yang dipegang oleh Tiongkok.

---

<sup>5</sup> Alexander Chipman Koty, "China's Corporate Social Credit System : What Business Need to Know", diakses dari : <https://www.china-briefing.com/news/chinas-corporate-social-credit-system-how-it-works/>, pada : 12 November 2021 pukul 12.35 WIB.

Sementara itu, perusahaan asing mempunyai paham moral dan standar yang tentunya berbeda. Salah satu penelitian meneliti perilaku perusahaan-perusahaan barat dalam melakukan pendekatan terhadap pegawai Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan, cara kerja, serta birokrasi kebiasaan yang berlaku di perusahaan asing tidak efektif diimplementasikan di Tiongkok karena terdapat ketidakcocokan di bidang manajemen sumber daya manusia antara perusahaan Tiongkok dengan perusahaan barat, khususnya dalam peningkatan motivasi kerja dan retensi staf.<sup>6</sup> Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian prinsip kebiasaan antara perusahaan asing yang berasal dari wilayah barat dengan Tiongkok.

Jika ditarik ke belakang, antara Tiongkok dan Barat memang memegang prinsip moralitas yang sangat bertolak belakang. Masyarakat Tiongkok memiliki budaya kerja dan bermasyarakat yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Akar utama yang mendasari perilaku masyarakat Tiongkok, mereka memandang bahwa masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik jika individu-individu di dalamnya tidak mengorbankan kebebasan mereka.

Hal tersebut sesuai dengan paham konfusianisme yang dianut oleh negara Tiongkok bahwa keberadaan seseorang merupakan bagian dari semesta, yang memiliki rasa moralitas untuk mempertahankan harmoni kehidupan.<sup>7</sup> Dari pendapat

---

<sup>6</sup> M.H Bond dan K.K Hwang, *The Social Psychology of Chinese People*, (Hong Kong : Oxford University Press, 1986, hlm. 283.

<sup>7</sup> Lian Hwang Chiu, "A Comparison of Moral Reasoning in American and Chinese School Children", *International Journal of Adolescence and Youth*, Vol.2,1990, hlm. 186.

konfusianisme tersebut juga dapat diartikan bahwa perilaku moral yang dilakukan oleh seseorang akan mempengaruhi kehidupan semesta di sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya. Dengan pemahaman ini, masyarakat Tiongkok beserta perusahaannya diharapkan untuk menekan identitas mereka sendiri demi kepentingan bersama atau dalam hal ini negara.

Berbeda dengan Tiongkok, moralitas yang dianut Barat adalah kebalikannya. Kohlberg menyatakan paham Barat mengenai konsepsi moral manusia adalah sebagai makhluk yang bebas memiliki pilihan dan menentukan takdirnya sendiri, manusia adalah makhluk yang memiliki otonomi atas dirinya sendiri.<sup>8</sup> Hal ini berlaku pula pada moral dan budaya perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara Barat. Adanya kebebasan berekspresi dari konsep moral Barat membuat kepentingan bersama juga harus memperhatikan pemenuhan otonomi individu-individunya, sehingga moral bisnis yang tercipta menjadi lebih liberal. Hal ini menjelaskan ketidakcocokan budaya bisnis antar masyarakat Tiongkok dengan perusahaan Barat.

Walau tak bisa dipungkiri bahwa pasca reformasi ekonomi Tiongkok di tahun 1990, ekonomi negara Tiongkok tidak lagi tertutup seperti dulu.<sup>9</sup> Tiongkok memberlakukan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan kapitalis layaknya negara Barat. Walau mereka enggan melepas status komunis dan sosialis dari ideologinya, tetapi dalam praktiknya negara ini mempraktikkan sistem kapitalis. Xi Jinping, presiden Tiongkok saat ini tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa negara

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> M. Chen, *Asian Management System*, (London : Routledge, 1995), hlm. 76.

Tiongkok menganut sistem kapitalisme di dalam perekonomiannya, tetapi lebih mengklaim hal itu sebagai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.

Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok sendiri merupakan hasil dari integrasi unsur-unsur kapitalisme dan perilaku otoriter partai komunis menuju sistem ekonomi Tiongkok demi bertahan dan beradaptasi dengan realitas baru.<sup>10</sup> Hal ini membuktikan bahwa Tiongkok juga melakukan akulturasi nilai-nilai ekonomi dari negara Barat setelah memutuskan untuk membiarkan perusahaan-perusahaan asing Barat memasuki pasar dan berinvestasi di negaranya. Akulturasi nilai moral ini seharusnya tak hanya dirasakan oleh Tiongkok melainkan juga perusahaan-perusahaan Barat yang berbisnis di Tiongkok.

Berkaitan dengan akulturasi perusahaan Barat dengan nilai moral Tiongkok, akhirnya pemerintah Tiongkok pada tahun 2020 memperketat pengawasan perusahaan-perusahaan yang berada di Tiongkok agar memiliki kesesuaian bisnis dan nilai perusahaan dengan karakteristik nilai moral Tiongkok, khususnya perusahaan asing. Pengetatan tersebut dilakukan dengan mengimplementasi suatu sistem skoring bernama sistem kredit sosial perusahaan atau SCS Perusahaan.

Sistem kredit sosial perusahaan memantau perilaku perusahaan menggunakan spektrum teknologi canggih. Tiap perusahaan harus mentransfer sejumlah data yang

---

<sup>10</sup> Muhaimin, "China, Negara Mengaku Komunis tapi Sistem Kapitalis", diakses dari : <https://international.sindonews.com/read/663917/40/china-negara-mengaku-komunis-tapi-sistem-kapitalis-1642798911?showpage=all>, pada : 1 September 2022, pukul 15.13 WIB.

dibutuhkan secara langsung ke pusat melalui beberapa tahapan proses pelaporan.<sup>11</sup> SCS Perusahaan dirancang untuk memfasilitasi peningkatan koordinasi antara Lembaga pengawas bisnis pemerintah Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan yang berbisnis di sana. Tujuan dari sistem kredit sosial dalam konteks bisnis ini adalah menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, adil, dan dapat diprediksi peluang serta masa depan keberlangsungan pasar.

Dalam konteks bisnis, sistem kredit sosial perusahaan memastikan perusahaan-perusahaan patuh terhadap peraturan dan membayar pajak dengan cara yang tepat. Selain itu pemerintah Tiongkok akan mengukur pula jenis dan kualitas pelayanan perusahaan terhadap konsumen. Sistem kredit sosial perusahaan di Tiongkok beroperasi dengan mengumpulkan, mengagregasi, dan menganalisa data dari berbagai bisnis untuk menghasilkan sebuah skor yang nantinya menentukan hukuman dan penghargaan bagi perusahaan tersebut.

Bagi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok, mereka setidaknya harus memerhatikan potensi-potensi kegagalan pasar yang diakibatkan oleh sistem kredit sosial. Pertama, sistem ini dapat membahayakan ranah pribadi seseorang. Penyebaran reputasi pribadi seseorang oleh teknologi, serta transparansi yang ditandai oleh mudahnya masyarakat untuk mengakses skor individu satu sama lain termasuk konsumen perusahaan. Sehingga reputasi perusahaan kini ditentukan juga oleh perilaku pekerjanya secara perorangan. Jika seorang individu dengan skor

---

<sup>11</sup> Alice de Jonge, "A Relational Governance Perspective on the Politics of China's Social Credit System for Corporations", *Hastings International and Comparative Law Review* Vol.44 No.2, 2021, hlm. 133.

kredit rendah mencoba mendaftarkan bisnisnya, maka bisnis itu akan mendapat *rating* yang rendah, begitu pula sebaliknya.<sup>12</sup> Data personal yang tersebar dan terakses dengan mudah memiliki peluang untuk dimanipulasi lebih tinggi oleh pesaing bisnis yang pada akhirnya tak hanya membahayakan reputasi perusahaan namun juga keamanan ranah pribadi seseorang yang bekerja di perusahaan itu.

Kedua, reputasi pasar perusahaan bisa terancam karena strategi manipulasi perilaku baik perusahaan melalui upaya-upaya penambahan ulasan baik terhadap jasa maupun produk yang ditawarkan. Sistem kredit sosial berusaha menciptakan masyarakat yang bermoral dan berperilaku baik. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan menyediakan insentif besar untuk mempengaruhi perilaku beberapa masyarakat khususnya pekerja dan konsumen setianya untuk melakukan *self profiting* seperti manipulasi skor dalam laporan berkala kredit sosial, memberi *review* palsu, *astroturfing* atau peningkatan reputasi perusahaan dengan ilusi dukungan yang belum tentu asli, dan lain sebagainya yang bertujuan meningkatkan reputasi perusahaan agar dapat terus bertahan serta dipercaya masyarakat umum.

Ketiga, masalah terkait perilaku monopoli yang akan memperlambat reputasi pasar untuk meningkat. Meningkatnya *review* dari masyarakat terhadap perilaku individu perusahaan bahkan perusahaan itu sendiri dikhawatirkan membuat perusahaan-perusahaan membuat suatu larangan bagi konsumen dalam memposting *review* secara *online* mengenai produk perusahaan. Sehingga akan menciptakan iklim

---

<sup>12</sup> Alexander Chipman Koty, "China's Corporate Social Credit System : What Business Need to Know", diakses dari : <https://www.china-briefing.com/news/chinas-corporate-social-credit-system-how-it-works/>, pada : 12 November 2021 pukul 12.51 WIB.

persaingan yang tidak baik antar perusahaan, serta membatasi kebebasan masyarakat untuk memberikan penilaian objektif terhadap suatu produk yang nantinya akan berdampak kepada sulitnya perusahaan membaca keberhasilan produk dalam memuaskan selera konsumen yang ditargetkan.

Keempat, SCS juga menekankan pertanggung jawaban rekan bisnis yang menjalin kerjasama dengan perusahaan. Sehingga walaupun suatu perusahaan secara legal telah melengkapi kewajibannya dan memiliki reputasi baik, jika perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan lain yang masuk ke *black list* SCS perusahaan negara Tiongkok maka perusahaan tersebut akan mengalami pengurangan skor kredit. Seperti SCS yang berlaku untuk masyarakat, perusahaan dengan skor kredit rendah akan menerima berbagai hukuman seperti inspeksi yang lebih sering dibanding perusahaan lain di sektor yang sama, tidak diperbolehkan mengambil keuntungan besar, dan pelarangan konsumen untuk mengonsumsi barang dan jasa dari perusahaan terkait, kesulitan dalam menjalin koneksi dengan perusahaan lain, dan lain sebagainya.

Australia merupakan negara yang akan terkena dampak dari sistem kredit sosial China ini. Posisi Australia sebagai negara sekutu Amerika di Asia Pasifik serta kultur perusahaan-perusahaan Australia yang tentunya memegang paham Barat, nampaknya akan membawa kesulitan tersendiri ketika harus mengimplementasi sistem kredit sosial di perusahaannya. Terlebih hubungan antar kedua negara dalam periode 2020-2021 ini cenderung buruk setelah Australia mengkritik kebijakan Tiongkok terkait Laut China Selatan yang agresif. Kemunduran hubungan diplomatik

juga ditandai dengan menurunnya investasi langsung Tiongkok ke Australia setelah Tiongkok memperketat regulasi perjanjian internasional untuk negara maju yang dibalas dengan sikap Australia yang juga memperketat persyaratan masuknya investor asing.<sup>13</sup>

Adanya *rewards and punishment* dalam sistem kredit sosial ditujukan untuk menegakkan perilaku yang dianggap benar secara moral masyarakat Tiongkok dalam kehidupan sehari-hari, tanpa terkecuali dunia bisnis termasuk bisnis perusahaan-perusahaan dari Australia yang terintegrasi dalam *supply chain* Tiongkok. Operasional perusahaan tersebut akan dipantau lebih komprehensif yang mana akan menghasilkan resiko dan tantangan baru bagi perusahaan Australia untuk dapat bertahan di pasar Tiongkok.

Salah satu sektor bisnis yang paling ketat diawasi adalah sektor teknologi karena sektor tersebut merupakan salah satu sektor bisnis sensitif di negara Tiongkok. Satu-satunya perusahaan bisnis teknologi Australia yang berhasil menembus pasar Tiongkok adalah perusahaan telekomunikasi Telstra yang telah beroperasi di Tiongkok sejak tahun 1989. Perusahaan ini mengoperasikan jaringan data di tiga puluh Sembilan kota di Tiongkok. Situasi yang tercipta akibat kebijakan pembatasan investor asing serta implementasi sistem kredit sosial perusahaan membuat Telstra memasuki pasar yang rumit di mana pengaruh Tiongkok terhadap perusahaan

---

<sup>13</sup> Lorenzo Anugrah Mahardika, "Tensi Memanas, Investasi China di Australia Anjlok 58%", diakses dari : <https://kabar24.bisnis.com/read/20200609/19/1250189/tensi-memanas-investasi-china-di-australia-anjlok-58-persen>, pada : 14 November 2021 pukul 12.05 WIB.

tersebut begitu besar, sehingga membawa ketidakpastian keberlangsungan bisnis perusahaan.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh rumusan masalah bahwa sistem kredit sosial perusahaan yang diberlakukan lebih ketat dibanding sistem kredit sosial masyarakat dan sistem kredit sosial untuk lembaga pemerintah membuat perusahaan-perusahaan asing khususnya perusahaan yang memiliki latar belakang bisnis yang sangat berbeda dengan Tiongkok mengalami kesulitan untuk bertahan di pasar Tiongkok.

Telstra sebagai perusahaan asing dari Australia berpotensi mengalami kesulitan dalam mengadaptasikan dan melangsungkan bisnisnya di Tiongkok akibat dari pengimplementasian sistem kredit sosial perusahaan Tiongkok yang begitu kental dengan budaya sosial dan bisnis masyarakat Tiongkok. Untuk menganalisisnya lebih jauh diperlukan data yang menjelaskan dampak dari SCS Perusahaan ini terhadap bisnis telekomunikasi Telstra, apakah pengaruh yang didapat positif atau negatif. Sehingga dari hal tersebut didapatkan data juga apakah bisnis Telstra bertahan di periode 2020-2021, strategi apa yang digunakan Telstra untuk bertahan, serta apa yang telah Telstra korbankan untuk tetap bertahan.

Dari rumusan masalah tersebut didapatkanlah pertanyaan penelitian pokok :

Bagaimana dampak dan pengaruh sistem kredit sosial perusahaan terhadap keberlangsungan bisnis teknologi telekomunikasi Telstra Australia di Tiongkok 2020-2021?

Serta diperoleh pula beberapa pertanyaan penelitian operasional :

- Apa dampak dan pengaruh sistem kredit sosial perusahaan terhadap bisnis perusahaan telekomunikasi secara umum di Tiongkok?
- Apa pengaruh hubungan bilateral Australia dan Tiongkok terhadap bisnis perusahaan Telstra di Tiongkok?
- Apa penyebab Telstra tetap dan mampu bertahan setelah implementasi sistem kredit sosial di Tiongkok?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian skripsi yang akan dilakukan ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang akan dijawab dalam hasil penelitian. Tujuan-tujuan tersebut di antaranya :

- a. Mengetahui secara detail dan mendalam mengenai implementasi serta dampak dari sistem kredit sosial di Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut, khususnya kepada perusahaan asing berbasis teknologi dari Australia.
- b. Mengetahui bagaimana respon Telstra sebagai satu-satunya perusahaan teknologi dari Australia yang beroperasi di Tiongkok terhadap sistem kredit

sosial perusahaan Tiongkok, serta apa saja langkah-langkah adaptif dan responsif yang telah dibuat Telstra sebagai strategi bisnisnya dalam kondisi ini.

#### **1.4.Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan untuk kajian mengenai hubungan Tiongkok-Australia. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini akan berguna ke depannya sebagai bahan referensi maupun pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Secara jelasnya, terdapat dua kegunaan yang penulis harapkan dalam penelitian ini :

- a. **Kegunaan ilmiah.** Dalam hal ini, penulis berharap penelitian ini akan berguna dalam memperkaya khazanah penelitian hubungan internasional yang membahas mengenai isu ekonomi internasional antara Tiongkok dan Australia sebagai negara yang memiliki paham ekonomi dan budaya yang berbeda. Terutama yang berkaitan langsung dengan sistem kredit sosial Tiongkok dan kebijakan perdagangan yang diambil kedua negara tersebut.
- b. **Kegunaan praktis.** Dalam hal ini, penulis berharap penelitian ini kelak dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti hubungan internasional lainnya yang tertarik dengan implementasi sistem kredit sosial Tiongkok dan dampaknya terhadap beberapa sektor perusahaan asing di Tiongkok.

## 1.5.Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini berdasarkan kepada pedoman yang telah diberikan. Di dalamnya akan memuat lima buah bab. Bab pertama berjudul “Pendahuluan” yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berjudul “Kajian Pustaka” berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, kerangka teori, dan kerangka pemikiran. Bab ketiga berjudul “Metodologi Penelitian” berisi pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai sistem kredit sosial perusahaan di Tiongkok, hubungan Tiongkok dan Australia dalam sektor industri teknologi, serta bagaimana dampak sistem kredit sosial perusahaan Tiongkok terhadap perusahaan telekomunikasi Telstra Australia di Tiongkok. Bab kelima berjudul “Kesimpulan” yang memuat kesimpulan dan saran, daftar Pustaka, serta lampiran-lampiran yang diperlukan dalam penelitian.